

KINERJA DAN PROSPEK KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA

Ika Fatmawati P. dan Didik Wahyudi

Staf Pengajar Fakultas Pertanian, Universitas Wiraraja

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan pangan, sistem distribusi, dan daya beli masyarakat di Indonesia secara umum. Alat analisis yang digunakan untuk melakukan peramalan adalah *Trend Linear* dengan metode kuadrat terkecil dan untuk memperoleh gambaran sistem distribusi digunakan analisis deskriptif, sedangkan daya beli masyarakat digunakan indikator upah nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai tahun 2012, Indonesia masih memiliki nilai kecukupan beras positif, sehingga sebenarnya tidak perlu mengimpor beras dari luar negeri. Sistem distribusi pangan, khususnya beras, pada dasarnya merupakan syarat utama terwujudnya swasembada pangan. Tanpa adanya sistem distribusi yang efektif dan efisien, swasembada pangan tidak mungkin tercapai. Oleh sebab itu, salah satu tugas penting dalam merumuskan "politik pertanian" sebagaimana yang diharapkan, penataan dan pemantapan sistem distribusi pangan menjadi sebuah kebutuhan. Tingkat daya beli masyarakat Indonesia untuk membeli pangan menurun tiap tahun mengalami penurunan. Penurunan daya beli masyarakat ini di sebabkan oleh pemerintah gagal mengontrol harga-harga, terutama harga migas dan kebutuhan pokok.

Kata kunci: kinerja, prospek, ketahanan pangan

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1996, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Output yang diharapkan dari pembangunan ketahanan pangan adalah terpenuhinya hak asasi manusia akan pangan, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan meningkatnya ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional (Siregar, dkk., 2003). Secara konseptual, masyarakat dikatakan mempunyai ketahanan pangan tinggi apabila tiga faktor utama yang menentukan dapat terpenuhi. Ketiga faktor tersebut meliputi: faktor ketersediaan pangan, faktor distribusi, dan faktor dana yang dimiliki masyarakat (Anonymus, 2001).

Penelitian "Kinerja dan Prospek Ketahanan Pangan di Indonesia" ini bermaksud untuk memberikan informasi ilmiah yang berkaitan tentang ketahanan pangan di Indonesia untuk beberapa tahun yang akan datang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kecukupan ketersediaan pangan, sistem distribusi pangan, dan kebijakan pangan di Indonesia untuk beberapa tahun mendatang.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pedagang dan pakar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber referensi dan instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, terutama BPS, Disperindag dan Bulog. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2007.

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab masalah pertama diperlukan peramalan:

- 1) Perkembangan jumlah penduduk.
- 2) Perkembangan sawah yang bisa ditanami padi di tingkat nasional.
- 3) Perkembangan produksi padi untuk beberapa tahun yang akan datang.

Untuk mengukur perkembangan digunakan *Trend Linear* dengan metode kuadrat terkecil (*Least Square Method*).

Untuk menjawab masalah kedua dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yang digali dari referensi-referensi yang ada dan instansi-instansi terkait, seperti Departemen Pertanian,

Dewan Ketahanan Pangan, BPS dan Bulog.

Untuk menjawab masalah ketiga digunakan indikator upah nyata. Kenaikan upah nyata inilah yang menunjukkan naik tidaknya tingkat daya beli masyarakat (Dajan, 1996).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ketersediaan Beras Dalam Negeri

3.1.1. Perkembangan Populasi Penduduk

Perkembangan populasi penduduk di Indonesia yang diperoleh pada tahun 2003 – 2012 mengalami peningkatan.

Tabel 1. Trend Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2003 – 2012

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2003	215.276.000,0
2	2004	216.382.000,0
3	2005	219.205.000,0
4	2006	219.647.400,0
5	2007	220.433.200,0
6	2008	222.262.660,0
7	2009	223.620.640,0
8	2010	224.978.620,0
9	2011	226.336.600,0
10	2012	227.694.580,0

Sumber: Data Primer Diolah, 2007

3.1.2. Perkembangan Produksi Padi

Perkembangan produksi padi di Indonesia yang diperoleh pada tahun 2003 – 2012 mengalami peningkatan.

Tabel 2. Trend Produksi Padi di Indonesia Tahun 2003 – 2012

No.	Tahun	Produksi Beras (Ton)
1	2003	52.137.604,0
2	2004	54.088.468,0
3	2005	54.151.097,0
4	2006	54.454.937,0
5	2007	55.127.430,0
6	2008	55.895.743,5
7	2009	56.530.355,6
8	2010	57.164.967,7
9	2011	57.799.579,8
10	2012	58.434.191,9

Sumber: Data Primer Diolah, 2007

Hasil produksi padi yang diperoleh, kemudian dikeringkan dan digiling menjadi beras. Jika tingkat konversi gabah ke beras sebesar 70 %, maka

jumlah produksi beras yang siap dimasak dan dikonsumsi (ketersediaan beras) dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Trend Produksi Beras di Indonesia Tahun 2003 – 2012

No	Tahun	Produksi Beras (Ton)
1	2003	36.496.322,80
2	2004	37.861.927,60
3	2005	37.905.767,90
4	2006	38.118.455,90
5	2007	38.589.201,00
6	2008	39.127.020,45
7	2009	39.571.248,92
8	2010	40.015.477,39
9	2011	40.459.705,86
10	2012	40.903.934,33

Sumber: Data Primer Diolah, 2007

Hasil produksi padi yang diperoleh, kemudian dikeringkan dan digiling menjadi beras. Jika tingkat konversi gabah ke beras sebesar 70 %, maka

jumlah produksi beras yang siap dimasak dan dikonsumsi (ketersediaan beras) dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Trend Produksi Beras di Indonesia Tahun 2003 – 2012

No	Tahun	Produksi Beras (Ton)
1	2003	36.496.322,80
2	2004	37.861.927,60
3	2005	37.905.767,90
4	2006	38.118.455,90
5	2007	38.589.201,00
6	2008	39.127.020,45
7	2009	39.571.248,92
8	2010	40.015.477,39
9	2011	40.459.705,86
10	2012	40.903.934,33

Sumber: Data Primer Diolah, 2007

3.1.3. Kecukupan Beras di Indonesia

Tingkat konsumsi orang Indonesia terhadap beras rata-rata ada

kecenderungan menurun. Selengkapya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Tingkat Konsumsi Orang Indonesia terhadap Beras

No	Tahun	Konsumsi (gr/kapita/hr)
1	2003	316,37
2	2004	316,37
3	2005	315,28
4	2006	314,58
5	2007	313,87
6	2008	313,26
7	2009	312,58
8	2010	311,90
9	2011	311,22
10	2012	310,54

Sumber: Data Primer Diolah, 2007

Dengan asumsi bahwa 100 % orang Indonesia mengkonsumsi beras kita dapat mengetahui tingkat kecukupan beras di Indonesia. Perhatikan Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Tingkat Kecukupan Beras di Indonesia

No	Tahun	Produksi Beras	Konsumsi/kapita	Jml Penduduk	Jml Konsumsi	Ketersediaan
1	2003	36496322,80	316,37	215276000	24859006,86	11637315,94
2	2004	37861927,60	316,37	216382000	24986722,27	12875205,33
3	2005	37905767,90	315,28	219205000	25225497,63	12680270,27
4	2006	38118455,90	314,58	219647400	25220287,87	12898168,03
5	2007	38589201,00	313,87	220433200	25253389,5	13335811,50
6	2008	39127020,45	313,26	222262660	25413246,94	13713773,51
7	2009	39571248,92	312,58	223620640	25513095,73	14058153,19
8	2010	40015477,39	311,90	224978620	25612271,41	14403205,98
9	2011	40459705,86	311,22	226336600	25710773,98	14748931,88
10	2012	40903934,33	310,54	227694580	25808603,44	15095330,89

Dari Tabel 6 diketahui bahwa Indonesia sampai tahun 2012 masih memiliki nilai kecukupan beras positif, sehingga sebenarnya tidak perlu mengimpor beras dari luar negeri. Kalaupun pada tahun-tahun tersebut impor dilakukan juga, maka ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi.

3.2. Sistem Distribusi Pangan di Indonesia

Dari sekian banyak indikator yang berhubungan dengan masalah pangan, tampaknya distribusi pangan adalah hal yang cukup strategis dan penting diantisipasi secara cerdas. Pasalnya, bukan saja karena Indonesia terdiri dari beragam pulau yang tersebar di seluruh

nusantara. Namun, bila kita simak dengan saksama, sistem distribusi pangan yang ada memang menuntut kita untuk selalu menghadapinya dengan sungguh-sungguh.

Kebijakan distribusi pangan sendiri pada dasarnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Kebijakan harga yang mantap akan merangsang dunia usaha dan masyarakat dalam mendistribusikan pangan. Hanya, apabila terdapat indikasi terjadinya "kegagalan pasar", peran pemerintah-melalui campur tangan langsung-tentu tidak dapat dielakkan. Meski demikian, hal itu tetap menyesuaikan dengan kondisi obyektif untuk menjamin tercapainya distribusi pangan yang efisien tersebut.

Agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan jaminan pendapatan yang memadai bagi produsen, pertama, jaringan pemasaran juga harus dikembangkan. Pasar harus terbuka agar terjadi kompetisi ataupun seleksi komoditas sesuai kualitas dan bentuk sebagaimana hakikat dari fungsi harga itu sendiri. Dengan begitu, kebijakan harga pangan yang menjadi landasan "stabilisasi harga pangan" secara keseluruhan memiliki fungsi. Pertama, menjamin terciptanya nilai tukar produk pangan yang wajar terhadap produk lain, seperti halnya kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah/beras.

Kedua, meminimalkan tingkat fluktuasi harga antarmusim/tahun sebagai upaya mewujudkan stabilisasi harga

pangan. Ketiga, mengendalikan tingkat harga sesuai dengan sasaran inflasi pada umumnya dan perkembangan harga dunia. Keempat, merangsang bekerjanya mekanisme pasar secara efektif dan efisien.

Sistem distribusi pangan, khususnya beras, pada dasarnya merupakan syarat utama terwujudnya swasembada pangan. Tanpa adanya sistem distribusi yang efektif dan efisien, swasembada pangan tidak mungkin tercapai.

3.3. Tingkat Daya Beli Masyarakat Indonesia

Indikasi terjangkaunya harga pangan dapat dilihat dari pendapatan masyarakat dibanding dengan indeks biaya hidup per kapita.

Tabel 7. Pendapatan Masyarakat dan Indeks Biaya Hidup

Tahun	Pendapatan Masyarakat (per capita)	Indeks Biaya hidup (Per capita)	Upah Nyata
2001	6,128,196.0	145,503.0	42.1173
2002	6,244,362.2	206,336.0	30.2631
2003	6,327,334.3	224,902.0	28.1337
2004	6,690,076.4	235,337.0	28.4276
2005	7,006,446.9	266,751.0	26.2659
Jumlah		1,078,829	

Sumber: data diolah, 2001-2005

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa tingkat daya beli masyarakat Indonesia untuk membeli pangan menurun yang di tunjukkan oleh nilai upah nyata yang tiap tahun mengalami penurunan. Rendahnya daya beli masyarakat mengakibatkan kemampuan menyediakan makanan yang bermutu dan cukup tidak memadai. Penurunan daya beli masyarakat ini di sebabkan oleh pemerintah gagal mengontrol harga-harga, terutama harga migas dan kebutuhan pokok.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sampai tahun 2012 Indonesia memiliki nilai kecukupan beras positif, sehingga sebenarnya tidak perlu mengimpor beras dari luar negeri. Walaupun pada tahun-tahun tersebut impor dilakukan juga, maka ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi.
2. Sistem distribusi pangan, khususnya beras, pada dasarnya merupakan syarat utama terwujudnya swasembada pangan. Tanpa adanya sistem distribusi yang efektif dan efisien, swasembada pangan tidak mungkin tercapai. Oleh sebab itu, salah satu tugas penting dalam merumuskan "politik pertanian" sebagaimana yang diharapkan,

penataan dan pematapan sistem distribusi pangan menjadi sebuah kebutuhan.

3. Tingkat daya beli masyarakat Indonesia untuk membeli pangan tiap tahun mengalami penurunan. Penurunan daya beli masyarakat ini di sebabkan oleh pemerintah gagal mengontrol harga-harga, terutama harga migas dan kebutuhan pokok

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. 2001. *Program Pembangunan Pertanian 2001 – 2004*. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Dajan, Anto. 1996. *Peramalan Bisnis*. BPFE. Yogyakarta.

4.2. Saran

1. Hendaknya perhitungan kebutuhan beras nasional dilakukan dengan memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas.
2. Impor pangan harus dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan siklus panen petani.

Siregar, A.N., Iin Ichwadi, Reni Kustiani, Siti Maryam, Wini Trilaksani dan Yuliana, 2003. *Ketahanan Pangan dan Upaya Pencapaiannya*. Makalah pada Program Pasca Sarjana IPB.

Undang-undang No 7 Tahun 1996 Tentang Ketahanan Pangan.